

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PENERINTAHAN NOMOR 02 TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN PP NO. 71 TAHUN 2010 DI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK

Riyanto Utomo, Cahaya Elbash

ABSTRAK

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang diatur dalam PP No. 24 tahun 2005. Pemerintah Kabupaten Gresik telah menyajikan salah satu unsur laporan keuangan yaitu laporan realisasi anggaran Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 71 tahun 2010 tentang penyajian laporan realisasi anggaran berbasis akrual. Penelitian ini metode analisis deskriptif. Metode pengumpul data yang dilakukan adalah proses wawancara dan riset kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan realisasi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik telah menggunakan pencatatan terkomputerisasi yang disebut SIMDA. Penyajian laporan realisasi anggaran di Dinas Pekerjaan Umum secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAP No. 2, dengan menyajikan struktur laporan realisasi anggaran, periode pelaporan, dan isi laporan realisasi anggaran .

Kata kunci : Penerapan PSAP No. 2, laporan realisasi anggaran

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Tata pemerintahan yang baik (*good Governance*) merupakan prinsip pokok bagi pemerintahan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.

Dalam Undang-undang N0. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah salah satu landasan *yuridis* bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia.

Kabupaten Gresik sebagai salah satu kabupaten yang senantiasa dari tahun ke tahun berupaya untuk meningkatkan

daerahnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Dalam hal pembangunan senantiasa harus mengacu pada suatu perencanaan yang dijabarkan dalam pola Dasar Pembangunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah / Panjang dan Rencana Jangka Pendek, Arah Kebijakan Umum, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD). Kebijakan perencanaan tidak lepas dari sumber pembiayaan yang tersedia maupun yang direncanakan dan urutan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan.

Pada tahun 2010, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Perubahan yang nyata dari SAP sebelumnya yang diatur oleh PP No.24 Tahun 2005 adalah diwajibkannya penggunaan Akuntansi Berbasis Akrua (*accrual*) oleh Pemerintah termasuk daerah, dari yang sebelumnya menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual (*cash to ward accrual*)

Sehubungan dengan penerapan PSAP no. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas penyelenggaraan Daerah disebutkan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang memerintahkan untuk memeriksa apakah laporan keuangan SKPD yang terdiri dari atas laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan serta laporan pemerintah daerah telah disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintahan, serta tepat waktu..

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di salah satu SKPD dilingkup wilayah kerja Pemerintahan Kabupaten

Gresik karena sebagai instansi yang mengurus realisasi anggaran, tentu sangat relevan dengan penelitian yang membahas masalah Penerapan PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran .

Rumusan Masalah

Bagaimana Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik.

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Bagaimana Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Yang Disusun Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik sudah sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintahan Nomor : 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan PP No:71 Tahun 2010.

Manfaat Penelitian

Sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan dapat digunakan sebagai bahan masukan informasi kepada para pegawai dan karyawan untuk dijadikan panduan mengenai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan No.02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010.

2. Manfaat Praktis.

Adapun manfaat penelitian secara praktis adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis
Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan bagi peneliti untuk lebih mengenai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan No.02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010.
- b. Bagi Universitas Gresik.
Dapat digunakan sebagai referensi Tugas Akhir S1 Universitas Gresik, khususnya mengenai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan No.02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010. Serta dapat menambah koleksi karya ilmiah bagi perpustakaan Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi di Universitas Gresik.
- c. Bagi Objek Penelitian (Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Gresik).
Dapat dipakai sebagai salah satu cara dalam melakukan penyempurnaan dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan No.02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010.
- d. Bagi Pembaca
Memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai sistem Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan No.02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 di Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Gresik, sehingga tidak menimbulkan persepsi yang salah dan dapat digunakan sebagai referensi dalam penulisan tugas akhir bagi peneliti lain.
Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat

teoritis serta manfaat praktis sebagai berikut:

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

1. Definisi Otonomi Daerah
Dalam kerangka Negara kesatuan, pemerintahan pusat masih memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap daerah otonomi. Menurut Bastian (2006 : 338) ada beberapa asas penting dalam Undang-undang otonomi daerah yang perlu dipahami, yaitu :
 - a. Asas *desentralisasi*
 - b. Asas *dekonsentrasi*
 - c. Tugas pembantu
 - d. Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah
2. Akuntansi Sektor Publik
Menurut Mardiasmo (2009), akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik yang memiliki wilayah lebih luas dan kompleks dibandingkan sektor swasta atau bisnis. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (Pemerintahan Pusat dan Daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara dan daerah (BUMN dan BUMD), yayasan, universitas, organisasi politik dan organisasi massa, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dilihat dari variabel lingkungan, sektor publik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor-faktor lain seperti politik, sosial, budaya, dan historis, yang menimbulkan perbedaan dalam pengertian, cara pandang, dan definisi. Sektor publik dapat dipahami sebagai entitas yang aktivitasnya menghasilkan barang

dan layanan publik dalam memenuhi kebutuhan dan hak publik.

1. Standar Akuntansi Pemerintahan

Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP yang telah ditempatkan dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 yang sekarang telah diganti dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.

Menurut KSAP dalam PP N0. 24 Tahun 2005, SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia. SAP diperlukan untuk menjaminkonsistensi dalam pelaporan keuangan pada sektor publik.

3. Laporan Realisasi Anggaran

Menurut PPN0. 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan, bahwa Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/ daerah, yang menggambarkan perbandingan an tara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan. Unsur yang dicakup secara

langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari:

a. Pendapatan

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh bendaharawan Umum Negara/ Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/ Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

c. Transfer

Transfer adalah penerimaan/ pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

d. Surplus/defisit

Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

e. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

- f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran
Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

Kerangka Pikir

Pengertian Akuntansi dapat dijelaskan melalui dua pendekatan yaitu dari segi proses dan segi fungsinya. Dilihat dari segi prosesnya akuntansi adalah suatu keterampilan dalam mencatat, menegglongkan dan meringkas transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau perusahaan serta melaporkan hasil-hasilnya didalam suatu laporan yang disebut laporan keuangan

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian

Penulis melaksanakan penelitian pada kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik yang beralamat di Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo 129, Gresik, Jawa Timur 61121, Indonesia

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, demikianlah pendapat *Bogdan* dan *Guba*, *Fraenkel* dan *Wallen* menyatakan bahwa penelitian yang mengkaji kualitas hubungan, kegiatan, situasi, atau material disebut penelitian kualitatif, dengan penekanan kuat pada deskripsi menyeluruh dalam

menggambarkan rincian segala sesuatu yang terjadi pada suatu kegiatan atau situasi tertentu.

Metodologi kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dengan demikian penelitian ini akan menganalisa Penerapan Pernyataan Standart Akuntansi Pemerintah Tahun 2010.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian dimaksud untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Dengan demikian dalam penelitian kualitatif hal yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus penelitian karena fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data sehingga dengan batasan ini peneliti akan fokus memahami masalah-masalah yang menjadi penelitian.

Pada Penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah Penerapan Pernyataan Standart Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 berdasarkan PP 71 Tahun 2010 Tentang Laporan Realisasi Anggaran di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik sehingga dalam perkembangannya agar kedisiplinan dalam pelaporan dapat tepat waktu berjalan sesuai dengan mekanisme.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu data yang telah ada dan tersedia di buku-buku literatur ataupun sumber lain serta data pendukung lainnya yang bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum.

Metode Pengumpulan Data

Untuk melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan

Penelitian ini akan direncanakan di Dinas Pekerjaan Umum Pemerintahan Kabupaten Gresik. data primer yaitu data yang diperoleh melalui:

- a. Pengamatan (*Observasi*), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung obyek yang diteliti
- b. Wawancara (*Interview*), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan pimpinan atau pihak yang berwenang atau bagian lain yang berhubungan langsung dengan obyek yang penulis teliti.

2. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dimaksud untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang merupakan faktor penunjang yang bersifat teoritis/ kepustakaan

Penelitian ini berupa *kualitatif deskriptif* yang akan menjelaskan seberapa jauh penerapan PSAP 02 dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintahan Daerah Kabupaten Gresik serta menggunakan teknik pengumpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Riwayat Singkat Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik

Di tahun 1974 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik dibentuk sesuai dengan perubahan status pemerintahan dari Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik. Adapun bidang Pekerjaan Umum yang ditangani meliputi pengelolaan jalan dan jembatan serta kebersihan.

Tahun 1987 Sebagai urusan bidang urusan pemerintah dibidang pekerjaan umum diserahkan kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat maupun propinsi.

Tahun 1992 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah (DKPD) Kabupaten Gresik berdiri. Bidang pengelolaan kebersihan yang sebelumnya ditangani Pekerjaan Umum, pada tahun tersebut beralih pada DKPD.

Tahun 2001 struktur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik meliputi bidang Bina Marga , Cipta Karya, Pengairan dan Kebersihan.

Pada Tahun 2009 Struktur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik mengalami perubahan dengan berkurangnya bidang ditangani, yaitu Bidang Kebersihan.

Tahun 2013 Struktur bertambah, UPT pengelolaan limbah cair.

Visi dan Misi

Visi

Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015 yakni :

Terwujudnya Sarana Prasarana Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, Permukiman yang andal untuk mendukung Gresik Lebih Baik dan Berkualitas.

Misi

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik tahun 2011-2015 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Manajemen Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman
2. Mewujudkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman yang berkualitas.

3. Mewujudkan Pembinaan dan Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman yang prima.

Tujuan dan Sasaran.

Tujuan

1. Untuk mewujudkan misi “Mewujudkan Manajemen Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman yang professional” maka ditetapkan tujuan :
Meningkatkan kualitas SDM Aparatur dan sarana prasarana penunjang kinerja pembangunan urusan pekerjaan umum, Perumahan dan tata ruang.
2. Untuk mewujudkan misi “Mewujudkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman yang Berkualias” maka ditetapkan tujuan :
Meningkatkan kualitas operisonal, pemeliharaan dan pembangunan fisik sarana dan prasarana urusan pekerjaan umum, perumahan dan tata ruang.
3. Untuk mewujudkan misi “Mewujudkan Pembinaan dan Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman Yang Prima” maka ditetapkan tujuan :
Menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dalam rangka memberikan pelayanan Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah atas Laporan yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum

Pengakuan Pendapatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik

Dalam menjalankan program program yang sudah dianggarkan setiap

periode, pemerintah daerah membutuhkan dana untuk membiayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang disusun setiap tahunnya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lainya pendapatan yang sah.

1. Pengakuan Pendapatan dari PAD
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Sumber penerimaan daerah dari PAD pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 1.428.801.500. Pajak daerah adalah penerimaan asli daerah yang dipungut oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik

- a. Pendapatan restribusi daerah
Penerimaan PAD berupa pendapatan restribusi daerah pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 1.425.907.500. Penerimaan restribusi adalah penerimaan asli daerah yang dipungut oleh Dinas Pekerjaan Umum
- b. Pendapatan hasil pengelolaa kekayaan daerah yang dipisahkan.
Merupakan bagian laba atas pernyataan kepada Unit Pengelola Tekhnis dibawah naungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik. Dalam Tahun Anggaran 2015 jumlah pengelolaan kekayaan yang dipisahkan sebesar RP 1.425.907.500
- c. Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah.
Lain-lain pendapatan asli daerah merupakan PAD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik, selain penerimaan pajak daerah, restribusi daerah dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dalam tahun anggaran 2015, jumlah lain lain pendapatan asli sebesar Rp. 2.894.000,00.

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/ Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/ Daerah.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto. Asas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

Pendapatan menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut.

Rekening Kas Umum adalah rekening tempat penyimpanan uang yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Pemungutan pajak dan redistribusi dilakukan oleh bendahara penerimaan, Menurut ketentuan hasil penerimaan langsung disetor oleh Bendahara penerimaan ke Rekening Kas Umum. Dikaitkan dengan pengakuan pendapatan berdasarkan basis kas maka pendapatan diakui setelah penyeteroran oleh bendahara penerimaan ke Rekening Kas Umum.

Contoh salah satu jurnal untuk mencatat pengakuan pendapatan

atas PAD yang diterima Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 19 Februari 2015, Bendahara Penerimaan di Dinas Pekerjaan Umum mencatat PAD dari sewa Russunawa I, II, III, dan IV .

Jurnal umum yang dibuat Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

Kasdi Bendahara Penerimaan Rp. 117.674.537,00 Rek. PAD Rp. 117.674.537,00

2. Pengakuan Pendapatan lain-lain Pendapatan yang sah

Lain-lain pendapatan yang sah berasal dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat dan pendapatan lainnya. Penerimaan daerah lain-lain pendapatan yang sah tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik sebesar Rp. 2.894.000,00. Bendahara Penerimaan mencatat adanya pendapatan lain-lain yang sah apabila kas telah masuk rekening kas.

Pengakuan Belanja Pada Dinas Pekerjaan Umum

Belanja Pemerintah Kabupaten Gresik terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan transfer bagi hasil ke Kabupaten/ Kota/ Desa. Menurut PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan (SAP), belanja adalah pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/ Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran oleh pemerintah.

Atas setiap pengeluaran belanja yang dilakukan setiap SKPD perlu didukung bukti berupa SPM (Surat Perintah Membayar). Yang telah ditanda

tangani oleh Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) dari masing-masing SKPD. Penandatanganan SPM oleh PPA sebagai pernyataan atas adanya penggunaan anggaran dilingkungan SKPD-nya. SPM yang telah ditandatangani diajukan kepada Bendahara Umum Daerah sebagai otoritas yang akan melakukan pencairan dana.

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah belanja yang dikeluarkan dari Kas Umum/ Daerah untuk kegiatan operasional pemerintah. Belanja Operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja buga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan social dan belanja bantuan keuangan.

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja yang dibayarkan kepada pegawai dilingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik. Belanja pegawai terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja diklasifikasikan berdasarkan criteria apakah belanja berkaitan langsung dengan program/ kegiatan atau tidak. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan, sedangkan belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan program/ Kegiatan.

Contoh salah satu jurnal yang dibuat pada saat pengakuan adanya belanja langsung adalah : Pada tanggal 4 Mei 2016, Dinas Pekerjaan Umum melakukan pembayaran honorarium panitia pengadaan barang/jasa dan panitia penerimaan hasil pekerjaan pengadaan kendaraan dinas/ operasional roda empat sesuai dengan SPM (Surat Perintah

Membayar). Transaksi belanja ini adalah sebagai berikut:

R/K SK Rp 4.500.000,00
Reken. Bantuan RP. 4.365.000,00
Penerima PFK -Pph Ps 21 Rp 135.000,
Penerimaan PFK-Pph Ps 21Rp 135.000,00

Utang PPh Pusat Rp 135.000 pengakuan atas belanja langsung ini diakui ketika adanya pengeluaran kas dari Rekening Umum Daerah sebesar jumlah uang tertera di SPM yang telah ditandatangani oleh Pejabat Pengguna Anggaran (PPA).

b. Belanja barang dan jasa.

Barang dan jasa merupakan belanja yang dibayarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik untuk kegiatan operasional

c. Belanja hibah .

Belanja Hibah merupakan belanja yang dibayarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik untuk dihibahkan kepada pihak luar.

d. Belanja bantuan keuangan

Belanja bantuan keuangan merupakan bantuan keuangan yang dibayarkan oleh Dinas PU Kabupaten Gresik.

2. Belanja modal

Belanja modal merupakan belanja yang menambah asset tetap Dinas Pekerjaan Umum

3. Belanja tak terduga

Belanja tidak terduga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik

4. Transfer

Transfer adalah transfer/ bagi hasil ke desa yang merupakan bagi hasil pajak dan retribusi serta Alokasi Dana Desa (ADD) .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengungkapan dan Penyajian pendapatan, belanja dan pembiayaan berdasarkan SAP adalah untuk mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan, basis yang dipakai serta jumlah dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diakui dalam laporan keuangan yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum selama satu periode pelaporan.

Pengungkapan pendapatan belanja dan pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Pengungkapan pendapatan dibagi menjadi tiga bagian yaitu Pendapatan Asli Daerah,

Untuk pengungkapan belanja, dibagi menjadi tiga bagian yakni belanja operasional, belanja tidak terduga. Serta untuk pembayaran dan pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Penyajian pendapatan, belanja dan pembiayaan Laporan Realisasi Anggaran juga memberikan informasi mengenai penerimaan dan penggunaan anggaran dan realisasinya dalam tahun 2015, dimana tahun 2015 terdapat realisasi anggaran penerimaan pendapatan di Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp 1.428.801.500 dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 2.001.150.500 dan belanja daerah yang sudah teralisasi pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp 533.252.533.036 dari anggaran yang ditargetkan sebesar 598.321.097.273.

Untuk melengkapi pembahasan pada bab ini dibawah ini diberikan contoh pembuatan laporan keuangan SKPD.

Dinas Pekerjaan Umum untuk tahun 2015 mempunyai target pendapatan dan pagu belanja sesuai dengan DPA SKPD sebagai berikut :

1. Pendapatan Rp. 1.295.000.000
2. Belanja
Belanja tidak langsung
Rp 2.075.000.000

Belanja langsung

Rp 95.425.000.000

Rp. 97.500.000.000

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai Penerapan Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik, didapatkan kesimpulan yaitu :

Penyajian dan pengungkapan pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik yang dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran sudah sesuai dengan PP N0 71 Tahun 2010.

Saran

Perlu penambahan pegawai yang memiliki keahlian dibidang akuntansi daerah di Dinas Pekerjaan Umum agar pencatatan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 30 Mei 2016 Buku I Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015
- Dadang Suwanda, S.E., M.M., M. Ak., Ak., CA. dan Hendri Santosa, S.E., M.Si., Ak., CA. 2014 *Kebijakan Akuntansi berbasis Akrual berpedoman pada SAP*. Cetakan pertama diterbitkan oleh PT Remaja Rosdakarya.

- Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Gresik, Januari 2015 Sketsa Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten
Gresik.
- Djultaningsih, T. dan M Oktafani.
2012. *Hubungan Penerapan
PSAP Nomor.2 Tentang
Laporan Realisasi Anggaran
Dengan Tingkat Kesejahteraan
Masyarakat (Studi Kasus pada
Pemerintah Kota Tangerang
Selatan)*. Simposium Nasional XV
Banjarmasin. 20-30 September:
1-24.
- Ifa Detri Stefani. 2014. *Penerapan
Pernyataan Standart Akuntansi
Nomor 02 Tentang Laporan
Realisasi Anggaran (Studi Kasus
Pada Pemerintahan Daerah
Kabupaten Grobogan)*.
- Nurlan Darise' Ak Drs., M.Si. 2008
Akuntansi Keuangan Daerah,
cetakan I, PT Macanan Jaya
Cemerlang.
- Pedoman Studi Akuntansi dan Manajemen
Fakultas Ekonomi Universitas
Gresik Tahun 2013, *Pedoman
Penulisan Skripsi*
- Riyanto, SE., MM, Puji Agus SST., AK., M.
Ak., CA. 2015. *Akuntansi
Pemerintah Daerah berbasis
Akrual*, Pustaka Pelajar
- Steven M. Bragg, 2012. *Panduan IFRS* .
PT Indek
- Yudha Pandu, 2007. *Standart Akuntansi
Pemerintahan*. Peraturan
Pemerintah Nomo 24 Tahun
2005, cetakan pertama, CV Karya
Gemilang
- V. Wiratna Sujareni, 2015. *Statistik untuk
Bisnis dan Ekonomi*, cetakan
pertama Pustaka Baru Press
- V. Wiratna Sujareni, 2015. *Akuntansi
Sektor Publik*, cetakan pertama
Pustaka Baru Pustaka Baru Press